



Pemerintah
Provinsi Papua



2024

Laporan KINERJA

**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua**

Kompleks Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Lantai 3
Surel : bpapprovinsipapua24@gmail.com
Laman : <https://ekbang.papua.go.id>

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien berdampak dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.

**KEPALA BIRO BEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



Dr. ANDRY, S.J.P., M.Si
PEMBINA TK.I

NIP. 19740129 200012 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB .I. PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
1. Bagian Kebijakan Perekonomian.....	1
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam	1
3. Bagian Administrasi Pembanguana	2
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Sumber Daya Aparatur	3
D. Sumber Daya Sarana Prasarana.....	3
E. Isu Strategis.....	4
BAB. II.PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	6
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
1. Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian	8
2. Sasaran 2: Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD Yang Lebih Baik.....	10
3. Sasaran 3: Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan Rekomendasi Bidang SDA	16

4. Sasaran 4: Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	21
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	26
BAB.IV. PENUTUP	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran.....	27
LAMPIRAN : LKJ BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 2024	3
Tabel 1.2 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan.....	3
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024	6
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	8
Tabel 3.2 Sasaran 1	9
Tabel 3.3 Sasaran 2	11
Tabel 3.4 Sasaran 3	17
Tabel 3.5 Sasaran 4.....	19
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	22
Tabel 3.7 Pelaksanaan Urusan Pilihan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024	23

DAFTAR GAMBAR

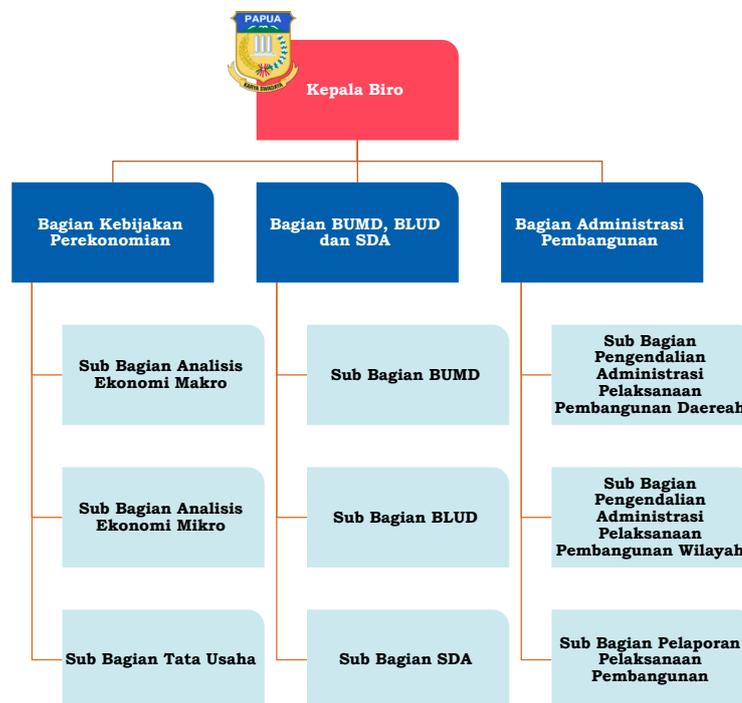
Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.....	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengemban tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dengan Struktur Organisasi seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan



Sumber : Pergub No.3 Tahun 2024

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian

- Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
- Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- Sub Bagian Tata Usaha Biro

2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam

- Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
- Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah; dan
- Sub Bagian Sumber Daya Alam

3. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

B. Tugas dan Fungsi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan Pembangunan daerah. Sedangkan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi Pembangunan;
2. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi Pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
5. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

C. Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah dan komposisi Pegawai pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Tahun 2024

NO	JABATAN	KONDISI EKSISTING						JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI					L	P
			S3	S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	
B	Jabatan Administrator								
	1 Administrator	2		2				1	1
	2 Pengawas	1			1			1	
	3 Pelaksana	41			10	1	30	17	24
C	Jabatan Fungsional								
	JUMLAH	45	1	2	11	1	30	20	25

Sumber : Data Kepegawaian Biro PAP Desember 2024

D. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	5.2.02.05.01.0005	Meja Kantor 1/2 biro laci modera mod 122	Olimpic	2024	39.122.001
2	5.2.02.05.01.0005	Meja Rapat	Indahci	2024	6.999.999
3	5.2.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Highpoint	2024	54.000.000
4	5.2.02.05.03.0007	Lemari Arsip Pejabat	Importa	2024	25.685.400

5	5.2.02.05.01.0005	Layar Tripod Tri 2121 84"/210cm Brite	Sony	2024	6.289.636
6	5.2.02.05.01.0005	UPS 600 VA	Prolink	2024	7.424.414
7	5.2.02.10.01.0002	PC ALL IN LENOVO CORE i5	Lenovo	2024	201.300.000
8	5.2.02.10.01.0002	Laptop Lenovo Legion i7	Lenovo Legion	2024	161.836.500
9	5.2.02.10.02.0003	Hardisk Eksternal	Portable SSD 1 TB	2024	4.960.580
10	5.2.02.10.02.0003	Led Projektor	Sony VPL DX	2024	16.238.200
11	5.102.01.01.0024	Penghancur kertas	Japan Eba-Eba	2024	21.212.100
JUMLAH					545.068.830

Sumber : Data Subag TU Biro PAP Desember 2024

E. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdapat 2 (dua) klasifikasi permasalahan yang di hadapi yaitu : permasalahan pada kebijakan, program, isu/program prioritas nasional dan daerah khususnya dalam bidang perekonomian serta pembangunan serta faktor internal yang mempengaruhi kinerja Biro.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kebijakan, program, isu/program prioritas nasional dan daerah khususnya dalam bidang perekonomian dan Pembangunan, diantaranya :

1. Penyusunan Kebijakan Perekonomian secara khusus dalam stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi daerah.
2. Perbaikan tata kelola BUMD melalui penguatan struktur dan penerapan Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
3. Belum optimalnya penerapan BLUD dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
4. Terbatasnya data/profil SDA dan belum optimal koordinasi lintas SKPD pengelola SDA.
5. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188.4/211/Tahun 2024 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
6. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

7. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satker/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Kuantitas dan kompetensi SDM Biro belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. Dimana sebagian besar staf merupakan CPNS dan belum sepenuhnya terisi jabatan struktural.
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para SDM Biro yang mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi. Berkaitan dengan perubahan nomenklatur pemerintahan dimana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan baru dibentuk pada awal Tahun 2024.
3. Masih terdapat multi interpretasi antara tugas dan fungsi Biro dan SKPD yang membidangi perencanaan dan Pembangunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Papua sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Tahun 2024

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang perekonomian}} \right) \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk kebijakan terdiri : Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
2.	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik}}{\text{Total Jumlah BUMD dan BLUD}} \right) \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi penguatan tatakelola yang baik BUMD dan BLUD melalui Pembinaan, monitoring dan evaluasi</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data BUMD dan BLUD
3.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang SDA}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang SDA}} \right) \times 100\%$ <p><i>Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk : Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</i></p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	<p><i>Formulasi:</i></p> $\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah Rumusan Kebijakan}} \right) \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengolahan Data Kebijakan dan Rumusan Kebijakan

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2.142.832.800
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.104.780.950
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.956.386.250
Jumlah		Rp 5.204.000.000

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan Gubernur Papua.

Capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024, akan dijelaskan berdasarkan Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis.

1) Sasaran 1 :

Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu :

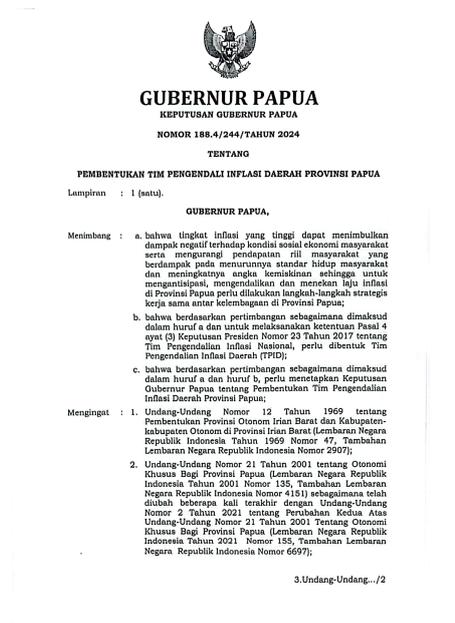
- a. Keputusan Gubernur Nomor 188.4/244/Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2024;
- b. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, melalui Kesepakatan Bersama Pengendalian Inflasi Daerah antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Rakor Inflasi Provinsi;
- c. Rekomendasi Kebijakan Swasembada Pangan Lokal, melalui Instruksi Gubernur Papua Nomor 7/Instruksi-Gub/Tahun 2024 tentang Gerakan Menanam Komoditas Pangan Strategis;

- d. Laporan Tinjauan Perekonomian Makro Provinsi Papua Tahun 2024.
- e. Laporan Pengendalian Inflasi Provinsi Papua Tahun 2024.
- f. Laporan sidak dalam rangka HBKN Tahun 2024.

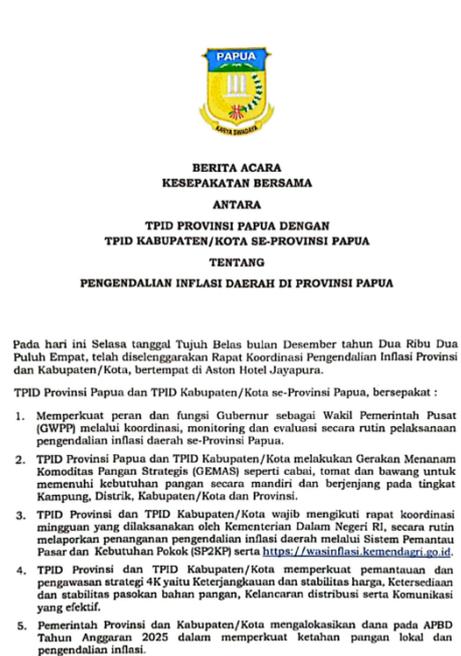
Tabel 3.2
Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			
					Target	Realisasi	Persentase	Kode
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	%	-	100%	100%	100%	

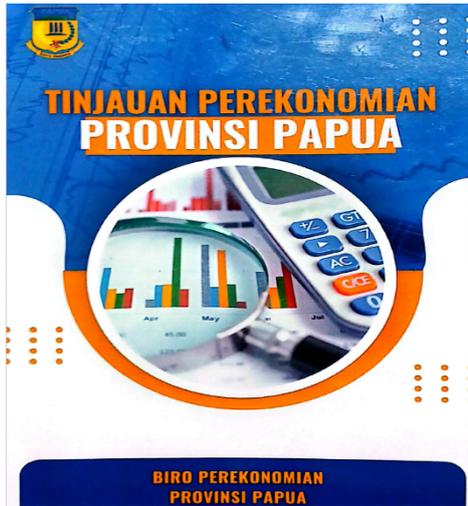
Dokumentasi/ evidence :



Keputusan Gubernur Nomor 188.4/244/Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2024



Kesepakatan Bersama Pengendalian Inflasi Daerah antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota



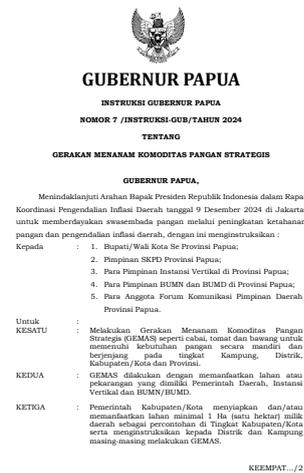
Laporan Tinjauan Perekonomian Makro Provinsi Papua Tahun 2024



Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2024



Laporan sidak dalam rangka HBKN Tahun 2024



Instruksi Gubernur Papua Nomor 7/Instruksi-Gub/Tahun 2024 tentang Gerakan Menanam Komoditas Pangan Strategis

**2) Sasaran 2 :
Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, minitoning dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik**

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :

- a. Laporan Kinerja BUMD
- b. Laporan Evaluasi Triwulanan BUMD
- c. Laporan Tahunan BUMD

- d. Laporan Pelaksanaan RUPS BUMD
- e. Laporan Evaluasi BLUD
- f. Laporan Evaluasi Triwulanan BLUD
- g. Laporan Monitoring BLUD

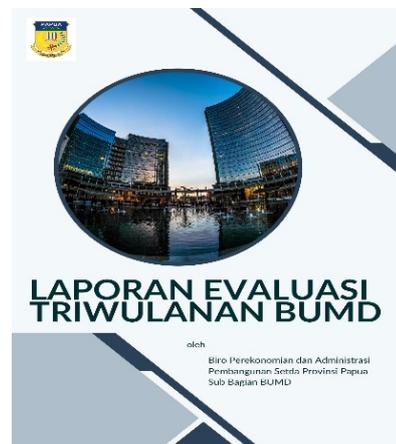
Tabel 3.3
Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			
					Target	Realisasi	Persentase	Kode
1	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, minitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	%	-	100%	100%	100%	

Dokumentasi/*evidence* :



Laporan Kinerja BUMD



Laporan Evaluasi Triwulanan BUMD



Laporan Tahunan BUMD



Laporan Pelaksanaan RUPS BUMD

Laporan Evaluasi Triwulanan BLUD

Laporan Pembinaan BLUD



Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan No. 019.3/126/BPAP/II/2024 Perihal Permohonan Audiensi dengan BPD

Surat Sekda No. 500/14275/SET tanggal 29 November 2024 Perihal Rapat Evaluasi Triwulanan BUMD



Surat Sekda No 539/9606/SET tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan RUPS PT. Irian Bhakti Mandiri



Surat Sekda No 539/9670/SET tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan RUPS PT. Irian Bhakti Papua



Surat Sekda No 900.1.13.2/14668/SET tanggal 10 Desember 2024 Perihal Pemutahiran BUMD Keuangan Kab/Kota Se-Provinsi Papua



Surat Sekda No 539/9602/SET tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Permintaan Data Dokumen Pembinaan Bank Pembangunan Daerah Papua



Surat Sekda No 539/9604/SET tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Permintaan Data Dokumen Pembinaan PT. Irian Bhakti Mandiri



Surat Sekda No 539/9605/SET tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Permintaan Data Dokumen Pembinaan PT. Irian Bhakti Papua

Jayapura, 18 Oktober 2024

Nomor : 000.1.5/12404/SET
Lampiran :
Hal : Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Bidang BUMD dan Administrasi Pembangunan
Yth. Kepala Biro BUMD, Inventaris dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat di BANDUNG
Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan, maka akan dilakukan koordinasi sebagaimana perihal dimaksud pada RRU (RUP) Inventaris dan Administrasi Pembangunan.
Sehubungan hal tersebut diatas, mohon kesediaan waktunya untuk dapat menerima kedatangan kami sebanyak 3 (tiga) orang yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Jamat, 25 Oktober 2024
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Biro BUMD, Inventaris dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Irene Samud, SH., MM Ht. 08154521970.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

J. GUBERNUR PAPUA
P. SEKRETIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
M. SETYO UTAMA MAJAYA
PEMANGKALAN, JAYAPURA
NIP. 19600421 198708 1 001

Tembusan:
P. Gubernur Papua

Jayapura, 12 - JUNI - 2024

Nomor : 000.1.5/6472/SET
Lampiran :
Hal : Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan BUMD dan BLUD
Yth. Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Ditjen, Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di JAKARTA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua di bidang BUMD dan BLUD, maka akan dilakukan kunjungan sebagaimana perihal dimaksud pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kesediaan waktunya untuk dapat menerima kedatangan kami pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Direktorat BUMD, BLUD dan BMD di Jakarta
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Irene Samud, SH., MM nomor Ht. 081256521970.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

J. GUBERNUR PAPUA
SEKRETIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
M. SETYO UTAMA MAJAYA
PEMANGKALAN, JAYAPURA
NIP. 19600421 198708 1 001

Surat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan No 000.1.5/12404/SET tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Bidang BUMD dan Administrasi Pembangunan di Provinsi Jawa Barat

Surat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan No 000.1.5/6472/SET tanggal 12 Juni 2024 Perihal Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan BUMD dan BLUD di Jakarta

Jayapura, 30 September 2024

Nomor : 000.7.28/10803/SET
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat
Yth. Daerah Tujuan
Jawab
Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan, maka akan dilakukan koordinasi sebagaimana perihal dimaksud pada RRU (RUP) Inventaris dan Administrasi Pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaan waktunya untuk dapat menerima kedatangan kami sebanyak 3 (tiga) orang yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Oktober 2024
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat, L.3, Kantor Gubernur Provinsi Papua
Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Irene Samud, SH., MM Ht. 08154521970.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

J. GUBERNUR PAPUA
P. SEKRETIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
M. SETYO UTAMA MAJAYA
PEMANGKALAN, JAYAPURA
NIP. 19600421 198708 1 001

Tembusan:
P. Gubernur Papua di Jayapura



Surat Sekda No 400.7.28/10803/SET tanggal 30 September 2024 Perihal Permintaan Data Dokumen Pembinaan BLUD

Surat Sekda No 500/14276/SET tanggal 29 November 2024 Perihal Rapat Evaluasi Triwulanan BLUD Konsultasi dan Koordinasi

Surat Sekda No 000.1.5/11477/SET tanggal 30 September 2024 Perihal Rapat Pengawasan BLUD

Pelaksanaan Bidang BUMD dan Administrasi Pembangunan di Provinsi Jawa Barat

RUPS Bank Pembangunan Daerah Papua Di Manokwari Tanggal 04 Maret 2024



Rapat Koordinasi Bersama Bank Pembangunan Daerah Papua Tanggal 18 Juli 2024



Audiensi Dewan Komisaris dan
Direksi PT. Bank Papua



11 Oktober 2024
RUPS PT. Irian Bhakti Papua



24 September 2024
RUPS Irian Bhakti Mandiri (Holding
Company)



04 Juli 2024
Pertemuan dengan Irjen
Kementerian dengan PT. Irian
Bhakti Mandiri dalam rangka



Pengawasan

04 Juli 2024
Pertemuan dengan Irjen Kementerian
dengan PT. Irian Bhakti Mandiri
dalam rangka Pengawasan



RUPS PT. JAMKRIDA



04 Desember 2024
RAPAT EVALUASI BUMD PROVINSI
PAPUA



Konsultasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan BUMD



dan BLUD di Jakarta

3) Sasaran 3 :
Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA

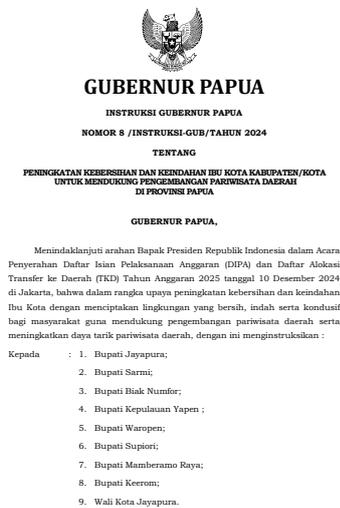
Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) dokumen yaitu :

- a. Rekomendasi Kebijakan SDA, melalui Instruksi Gubernur Nomor 8/Instruksi-Gub/Tahun 2024 tentang Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Daerah di Provinsi Papua.
- b. Laporan Evaluasi SDA
- c. Surat Sekda No 500/5935/SET tanggal 31 Mei 2024 Perihal Permintaan Data Bidang Perekonomian SDA
- d. Surat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan No 000.1.5/6472/SET tanggal 12 Juni 2024 Perihal Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
- e. Surat Sekda No 000.1.5/14842/SET tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rapat Pemetaan Potensi Perekonomian bidang Sumber Daya Alam.

**Tabel 3.4
Sasaran 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			
					Target	Realisasi	Persentase	Kode
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	%	-	100%	100%	100%	

Dokumentasi/ *evidence* :



Laporan Evaluasi SDA



Instruksi Gubernur Nomor 8/Instruksi-Gub/Tahun 2024 tentang Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Daerah di Provinsi Papua



Surat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan No 000.1.5/6472/SET tanggal 12 Juni 2024 Perihal Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan SDA di Jakarta

Surat Sekda No 500/5935/SET tanggal 31 Mei 2024 Perihal Permintaan Data Bidang Perekonomian SDA

Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan SDA di Jakarta



Surat Sekda No 000.1.5/14842/SET tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rapat Pemetaan Potensi Perekonomian bidang Sumber Daya Alam

4) Sasaran 4 : **Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah**

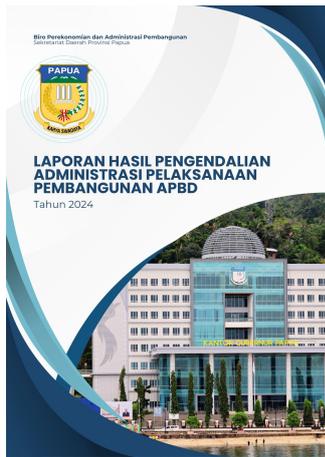
Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) dokumen yaitu :

- Rekomendasi Kebijakan Pembangunan, melalui Surat Sekda perihal rapat pengendalian realisasi APBD.
- Rekomendasi Kebijakan Pembangunan, melalui Surat Sekda perihal laporan pengendalian realisasi APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan oleh SKPD/Satker).
- Rekomendasi Kebijakan Pembangunan, melalui Surat Sekda perihal rapat realisasi paket pekerjaan strategis Tahun 2024.
- Rekomendasi Kebijakan Pembangunan, melalui Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2024.
- Rekomendasi Kebijakan Pembangunan, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025.

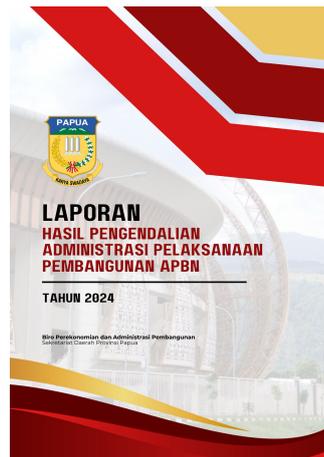
**Tabel 3.5
Sasaran 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			
					Target	Realisasi	Persentase	kode
1	Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	%	-	100%	100%	100%	

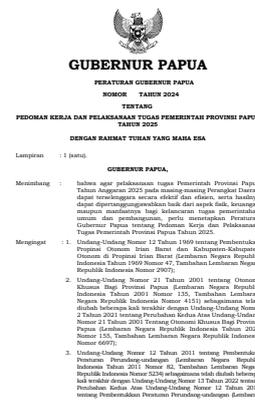
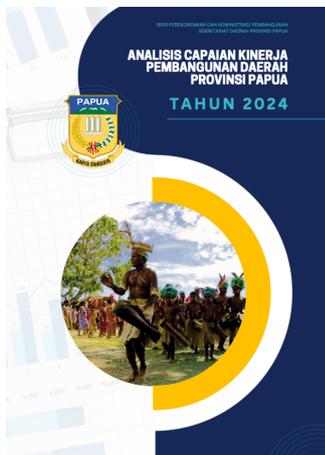
Dokumentasi/evidence :



Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

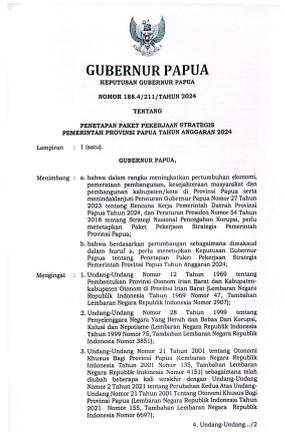


Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN



Dokumen Analisis Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah Provinsi
Papua Tahun 2024

Draft Pergub tentang Pedoman Kerja
dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tahun 2025



Pergub Nomor 188.4/211/Tahun
2024 tentang Penetapan Paket
Pekerjaan Strategis TA 2024

Dokumen/laporan pelaksanaan
Pembangunan daerah Provinsi
Papua

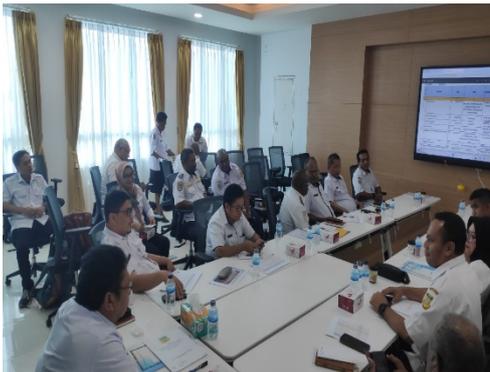


Foto Rapat/Surat tentang Paket
Pekerjaan Strategis TA 2024
(16 Oktober 2024)

Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBD TA 2024
(17 Oktober 2024)



Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBD TA 2024
(17 Oktober 2024)

Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBD TA 2024
(17 Oktober 2024)

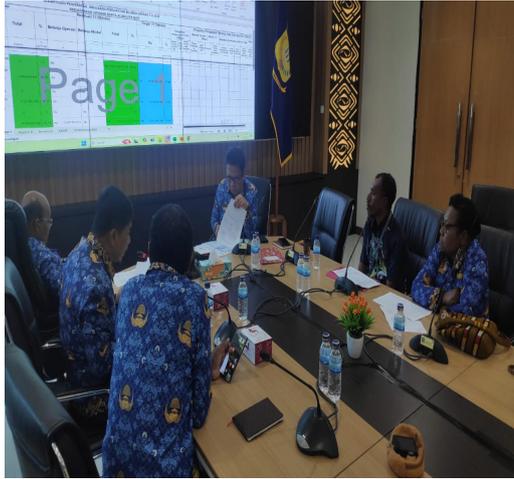


Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBD TA 2024
(17 Oktober 2024)



Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBD TA 2024
(17 Oktober 2024)



Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBN TA 2024
(18 Oktober 2024)



Foto Rapat/Surat tentang
Pengendalian APBN TA 2024
(Tanggal 18 Oktober 2024)

B. Realisasi Anggaran

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 mengelola Pagu senilai Rp. 5.204.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.945.605.321 atau 95,03%. Berikut realisasi anggaran akhir Tahun Anggaran 2024 pada setiap Program dan Kegiatan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.142.832.800	2.124.878.894	99,16
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.800.000	54.800.000	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.359.056.200	1.343.235.509	98,84
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	547.196.600	545.068.830	99,61
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.780.000	181.774.555	100
B	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.104.780.950	1.044.351.449	94,53
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	542.854.550	512.832.268	94,47
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	178.312.400	168.276.860	94,37
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	383.614.000	363.242.321	94,69
C	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.956.386.250	1.776.231.708	90,79
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.387.831.250	1.327.567.150	95,66
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	568.555.000	448.664.558	78,91
	JUMLAH	5.204.000.000	4.945.605.321	95,03

Sumber : SIPD RI Desember 2024

Tabel 3.7
Pelaksanaan Urusan Pilihan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2024					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	Persentase	Realisasi Output			
1 Pengendalian Administrasi Terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.142.832.800	2.124.878.894	99,16%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		54.800.000	54.800.000	100%				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		54.800.000	54.800.000	100%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.359.056.200	1.343.235.509	98,84%				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		195.591.880	193.641.880	99%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80.324.470	66.779.275	83,14%				
	Penyediaan Bahan/Material		13.654.850	13.436.755	98,40%				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		360.000.000	359.984.100	100%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		709.485.000	709.393.499	99,99%				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		547.196.600	545.068.830	99,61%				
	Pengadaan Mebel		126.330.900	125.807.400	99,59%				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		420.865.700	419.261.430	99,62%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		181.780.000	181.774.555	100%					

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		181.780.000	181.774.555	100%			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.104.780.950	1.044.351.449	94,53%			
1	Meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		542.854.550	512.832.268	94,47%			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	213.000.000	212.991.251	100%	1 Dokumen		
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	329.854.550	299.841.017	90,90%	1 Dokumen		
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		178.312.400	168.276.860	94,37%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	178.312.400	168.276.860	94,37%	1 Dokumen		
3	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, mitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		383.614.000	363.242.321	94,69%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	7 Dokumen	250.000.000	239.725.446	95,89%	7 Dokumen		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	133.614.000	123.516.875	92,44%	1 Dokumen		

1	Meningkatkan Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.956.386.250	1.776.231.708	90,79%			
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1.387.831.250	1.327.567.150	95,66%			
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Dokumen	1.122.022.460	1.071.866.255	95,53%	1 Dokumen		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Dokumen	265.808.790	255.700.895	96,20%	1 Dokumen		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		568.555.000	448.664.558	78,91%			
		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200.000.000	135.199.900	67,60%	1 Dokumen		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	161.090.000	161.089.900	100%	1 Dokumen		
		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	207.465.000	152.374.758	73,45%	1 Dokumen		

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi internal Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melaksanakan perbaikan – perbaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Peran Pimpinan untuk memotivasi dan menggerakkan implementasi akuntabilitas kinerja di setiap level pelaksana.
- 2) Menyusun dan melaksanakan pengembangan SDM Biro Perekonomian dan Administrasi yang akuntabel baik dalam segi kuantitas dan kualitas.
- 3) Menyusun *Cascading*, Pohon Kinerja, Proses Bisnis dan *Standart Operational Procedure* dan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun berikutnya.
- 4) Evaluasi kinerja *output* dan *outcome* di setiap level dan menindaklanjuti dengan perbaikan – perbaikan yang konstruktif.
- 5) Menciptakan inovasi untuk mengefektifkan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024.

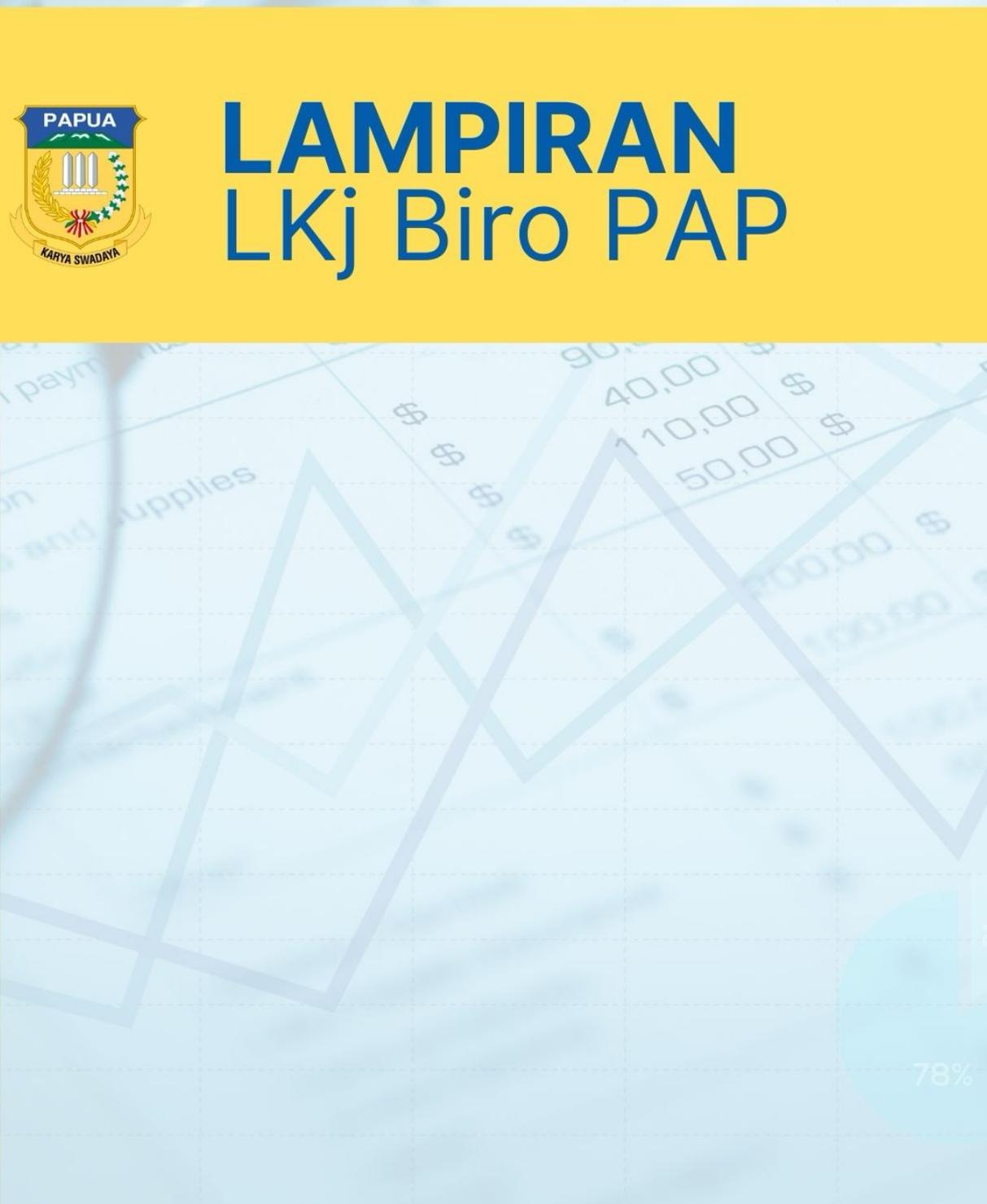
A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 ini menyajikan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran teknis sesuai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori 'sangat baik', dengan demikian capaian kinerja semua indikator perlu di dipertahankan di tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas ASN yang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja dalam melaksanakan kegiatan.
2. Diperlukan pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan profesionalitas dalam rangka peningkatan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu ASN dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, hendaknya dapat terus disempurnakan atau disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan berbagai kegiatan di monitor dan di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
5. Perlu Upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menggambarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua secara umum.



LAMPIRAN LKj Biro PAP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 2024-2026

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kompleks Kantor Gubernur, Jalan. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua.
Email : bpaprovinciapua24@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA NOMOR : 100.3.3.4/46/BPAP/24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : April 2024


PIL. KEPALA BIRO,
Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740129 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran /4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMABNGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR :
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Nama Organisasi : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok : Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan pembangunan daerah
3. Fungsi :
 - a. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang perekonomian}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan : Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk kebijakan terdiri : Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
2.	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik}}{\text{Total Jumlah BUMD dan BLUD}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan : Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi penguatan tatakelola yang baik BUMD dan BLUD melalui Pembinaan, monitoring dan evaluasi</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data BUMD dan BLUD
3.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang SDA}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang SDA}} \right) \times 100\%$ <p>Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk : Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
4.	Meningkatnya Pengendalian	Persentase rumusan kebijakan bidang	<p>Formulasi:</p>	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengolahan Data Kebijakan dan

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	pembangunan yang menjadi kebijakan	$\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah Rumusan Kebijakan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan : Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya Pergub, Keppgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>		Rumusan Kebijakan

Jayapura, April 2024
Pit: Kepala Biro,



Dr. ANDRI, S. IP., M. Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740129 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
Jabatan : **Pit. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, April 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR PAPUA



DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
NIP. 196410141986031016

PIHAK PERTAMA,
**Pit. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
NIP. 19740129 200012 1 002

Lampiran I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp 213.000.000
2	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
3	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
4	Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.077.515.000

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 709.485.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 213.000.000
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 2.077.515.000
	Jumlah	Rp 3.000.000.000

Jayapura, April 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR PAPUA



DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
NIP. 196410141986031016

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
NIP. 19740129 200012 1 002

**JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH SKPD DI TAHUN
2024**



2024

Laporan

KINERJA

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Kompleks Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Lantai 3
Surel : bpaprovinciapua24@gmail.com
Laman : <https://ekbang.papua.go.id>